

**URGENSI PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
CORRUPTION* (UNCAC) SEBAGAI UPAYA RESTORATIF  
DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

**Oleh**

**I Komang Angga Adi Setiawan, NIM. 2114101063**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan sanksi korupsi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta (2) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi bagi Indonesia ditinjau dari UNCAC sebagai upaya restoratif dalam pengembalian kerugian negara. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Sebagai dasar analisis, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan, bahwa pengaturan sanksi tindak pidana korupsi saat ini masih menekankan pada aspek retributif (pembalasan) terhadap pelaku korupsi, sedangkan upaya perampasan hanya digunakan sebagai pidana tambahan, sehingga bersifat fakultatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadinya kekosongan hukum perihal perampasan aset dengan metode *NCB Asset Forfeiture* yang bermuara pada keadilan yang bersifat restoratif dalam memulihkan kerugian negara. Kemudian (2) Indonesia telah meratifikasi UNCAC selaku konvensi internasional anti korupsi. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf c menawarkan mekanisme tepat untuk memberantas korupsi yaitu dengan melaksanakan perampasan aset dengan metode *NCB Asset Forfeiture*. Mekanisme ini menekankan pada aspek restoratif mengutamakan proses pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Mekanisme tersebut menjadi penting diterapkan di Indonesia mengingat bahwa Indonesia adalah negara peratifikasi UNCAC, berkembangnya tindak pidana motif ekonomi yang semakin kompleks, perampasan aset di Indonesia saat ini belum memadai, meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pencapaian tujuan negara Indonesia.

**KataKunci:** Korupsi, Perampasan Aset, Keadilan Restoratif

***THE URGENCY OF ASSET CONFISCATION IN CORRUPTION CRIMES  
IS REVIEWED FROM THE UNITED NATIONS CONVENTION  
AGAINST CORRUPTION (UNCAC) AS A RESTORATIVE  
EFFORT IN THE RETURN OF STATE LOSSES***

***By***

***I Komang Angga Adi Setiawan, NIM. 2114101063***

***Legal Studies Program***

***ABSTRACT***

*This research was conducted with the objectives of (1) To find out and analyze how corruption sanctions are regulated in Indonesia according to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and (2) To find out and analyze the urgency of asset confiscation in corruption crimes for Indonesia reviewed from UNCAC as a restorative effort in recovering state losses. In this study, normative legal research is used, with a legislative approach, a concept approach, a case approach, and a comparative approach. As the basis of the analysis, the legal materials used in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the research obtained, it shows that (1) Law Number 31 of 1999 shows that the current regulation of sanctions for corruption crimes still emphasizes the retributive aspect (retaliation) against corrupt actors, while expropriation efforts are only used as additional crimes, so they are facultative. This shows that there is still a legal vacuum regarding asset forfeiture with the NCB Asset Forfeiture method which leads to restorative justice in recovering state losses. Then (2) Indonesia has ratified UNCAC as an international anti-corruption convention. Based on Article 54 paragraph (1) letter c offers the right mechanism to eradicate corruption, namely by carrying out asset forfeiture using the NCB Asset Forfeiture method. This mechanism emphasizes the restorative aspect of prioritizing the process of recovering state losses due to corruption. This mechanism is important to be implemented in Indonesia considering that Indonesia is a UNCAC ratified country, the development of increasingly complex economic motive crimes, the current inadequate seizure of assets in Indonesia, increasing the effectiveness of eradicating corruption and maximizing the achievement of Indonesia's state goals.*

***Keywords:*** *Corruption, Asset Forfeiture, Restorative Justice*